

Forum Freedom 60, 10 Juli 2006

Tema: Memperkuat demokrasi liberal

Nara sumber : R. William Liddle

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

Hamid Basyaib

Halo selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Freedom Institut dan KBR 68 H, dan disiarkan ke 50-an radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini Prof. DR. William R. Liddle. Saya biasa memanggilnya Pak Bill. Ia adalah professor politik di Ohio University, State University di Columbus Amerika Serikat. Ia ahli politik Indonesia, Indonesianis. Selamat pagi..

William Liddle

Selamat pagi.

HB

Kita mau membahas tema “Memperkuat Demokrasi Liberal”. Kita tahu demokrasi itu ditafsirkan macam-macam, multitafsir. Banyak sekali negara mengklaim dirinya penganut paham demokrasi. Demokrasi ini seperti kata bertuah. Negara-negara yang tidak demokratis pun tidak berani mengaku tidak demokratis. Mereka semua mengaku demokratis. Misalnya negara seperti Republik Rakyat Cina, Korea Utara, Mesir, dst. Pendeknya, negara-negara itu mencantumkan demokrasi. Termasuk Indonesia, meski dengan embel-embel Pancasila. Tapi kita tidak berbicara demokrasi di Indonesia pada umumnya. Kita mau berbicara tentang demokrasi liberal. Pak Bill, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sangat umum: tadi saya sudah sebut banyak negara yang mengklaim dirinya demokratis. Mengapa makna demokrasi itu begitu beragam?

WL

Ini mungkin bukan jawaban yang memuaskan. Tapi kalau kita lihat perkembangan sistem-sistem politik secara empiris di dunia sejak pertengahan Abad 20, kita akan lihat bukan karena multitafsir, tapi karena keseragaman. Keseragaman yang makin banyak. Makna demokrasi yang sudah umum dari sebelumnya sebenarnya hanya satu. Mungkin salah satu alasan yang terpenting untuk itu adalah runtuhnya Uni Sovyet dan negara-negara komunis. Sebab selama hampir 100 tahun, mereka mengklaim mempunyai sejenis demokrasi. Demokrasi rakyat. Seperti kita lihat di Korea Utara. Tapi istilah itu kan sudah tidak dipakai lagi. Kecuali di Korea Utara, pada umumnya negara komunis sudah tidak ada lagi. Jadi demokrasi dalam pengertian liberal yakni berdasarkan hak-hak azasi, hak-hak politik. Ini sudah menjadi standar masyarakat di dunia saat ini.

HB

Jadi kecenderungannya terbalik. Dulu, paruh kedua Abad 20 mungkin masih banyak yang mengklaim demokrasi. Tapi kemudian terbukti bahwa demokrasi yang diklaim mereka sebenarnya bukanlah demokrasi sejati. Bukanlah demokrasi yang lebih sejati. Demokrasi yang lebih sejati itu demokrasi liberal, begitu?

WL

Ya. Istilah liberal itu agak janggal dipakai di Indonesia. Itu mengingatkan saya pada istilah sosialisme di Amerika. Istilah itu tidak bisa dipakai di Amerika.

HB

Itu istilah kotor di Amerika ya?

WL

Ya. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan dengan fondasi dari lembaga-lembaga demokrasi liberal itu adalah hak-hak politik untuk individu. Itu yang dimaksudkan dengan liberal. Jadi liberal berarti *liberty* atau kebebasan. Kebebasan yang memungkinkan seseorang berpartisipasi di dalam politik.

HB

Itu substansinya ya?

WL

Itu belum substansi. Kalau Anda menggunakan kata 'substansi' dalam pengertian teori demokrasi, itu lain lagi.

HB

Itu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Karena sekarang banyak keluhan bahwa demokrasi ini sifatnya lebih prosedural saja. Saya pernah bicara dengan DR. Saiful Mujani di forum ini. Dia menjawab kritik yang mengatakan bahwa demokrasi prosedural belum memuaskan dan memadai. Jadi yang diinginkan adalah demokrasi yang substantif. Tadi yang Anda katakan bukan demokrasi substantif?

WL

Saya mengalami kebingungan menjawab pertanyaan ini. Biasanya yang dimaksudkan dengan demokrasi substansi atau substansi demokrasi itu berkaitan dengan pemerataan ekonomi dan sosial. Itu lain lagi. Itu sebagai tujuan dari sebuah pemerintahan. Bukan unsur pemerintahan itu sendiri yang dimaksudkan dengan demokrasi.

Saya kembali ke istilah prosedural. Yang dimaksudkan dengan prosedural adalah pemilihan umum setiap lima tahun sekali untuk tingkat nasional. Tapi di belakang prosedur itu adalah (munculnya) hak-hak yang saya bicarakan tadi, yang memungkinkan prosedur itu berjalan. Jadi harus dianggap sebagai suatu kesatuan. Kita tidak bisa memisahkan prosedural dari hak-hak di belakangnya (dengan substansial). Ini mengingatkan kita pada orde baru. Kita bisa mengatakan bahwa orde baru menjalankan demokrasi prosedural. Dalam pengertian bahwa setiap lima tahun menjalankan pemilu. Dan yang memenangkan pemilu itu duduk di DPR. Tapi kita tahu bahwa itu bukan demokrasi. Itu diatur dari luar. Hak-hak yang saya bicarakan tadi tidak ada pada orde baru.

Kadang-kadang dalam demokrasi itu dipakai istilah prosedural dan liberal. Bagi saya lebih baik tanpa embel-embel. Kita mestinya bilang demokrasi saja. Dan yang kita maksudkan dengan demokrasi itu adalah prosedur di mana masyarakat memilih para pemimpin. Bukan hanya itu, masyarakat juga berhak memilih orang yang akan mewakili

mereka di badan legislatif. Masyarakat mempunyai fondasi hak-hak politik, kebebasan bicara, dsb.

HB

Dengan begitu berarti bisa dikatakan bahwa demokrasi itu tidak cukup hanya dengan menggelar pemilu?

WL

Tentu. Inilah yang menimbulkan ketegangan konsep-konsep ini dengan substansinya. Sebab kita semua ingin supaya sebuah negara demokratis itu mencapai cita-cita ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat. Tidak dikuasai oleh sebagian orang kaya untuk semakin memperkaya lagi misalnya. Tapi supaya kebijakan umum di negara itu dipakai sejauh mungkin untuk menyejahterakan masyarakat pada umumnya.

HB

Ini aspek menarik. Ada kecurigaan bahwa kontes demokrasi itu hanya menguntungkan mereka yang menang. Kelompok mayoritas. Padahal Anda bilang bahwa mestinya demokrasi itu untuk pemerataan (ekonomi). Bagaimana mengatasi problem ini?

WL

Saya agak alergi dengan istilah mayoritas dan minoritas. Sebab saya muridnya Prof. Robert A. Dahl. Dia sangat tidak suka menggunakan istilah mayoritas dan minoritas. Sebab umumnya di dunia nyata, kita bisa membicarakan secara abstrak mayoritas dan minoritas. Tapi dalam kenyataannya, yang selalu menentukan di dalam politik itu minoritas-minoritas. Coba saja lihat dalam pemerintahan SBY. Apakah di sana ada satu mayoritas yang berkuasa? Atau itu merupakan gabungan dari berbagai macam minoritas yang satu sama lain harus dipuaskan oleh SBY, misalnya.

HB

Ini tentang mayoritas. Misalnya satu partai mendapatkan suara 50+1 persen. Itu sudah mayoritas dan menang. Dalam hal ini ada kecurigaan bahwa mereka yang tidak memilih partai pemenang itu boleh disingkirkan. Kalau ingin mendapatkan hak-haknya, mereka harus menunggu lima tahun lagi...

WL

Masalah ini sering dibicarakan kalau kita membedakan antara sistem parlementer dan presidensial. Sebab yang Anda lihat dalam sistem parlementer, itu memang diciptakan secara artifisial sebuah mayoritas (itu memang sebuah mayoritas diciptakan secara artifisial?). Misalnya pemilu di Inggris. Di sana yang menang Partai Buruh. Menang dalam pengertian lebih dari separuh kursi DPR di Inggris dikuasai oleh Partai Buruh. Kemudian Tony Blair menjadi perdana menteri. Jadi partai oposisi disingkirkan untuk sementara waktu sampai ada pemilu lagi. Mereka kemudian membangkang; mengajukan program-program mereka meski tidak berhasil. Tapi itu sistem parlementer.

Lain halnya dengan sistem presidensial seperti di Amerika dan Indonesia. Bukan satu partai yang menang dan yang lain tersingkir. Di Indonesia tidak hanya sistem presidensial, tapi juga multipartai. Demikian juga di Amerika. Partai Demokrat atau Partai Republik sendiri (yang menguasai) kongres. Partainya Bush (Republik) bisa melawan dalam beberapa hal. Sebab di sana memang ada pembagian kekuasaan.

HB

Anda ngomong di tingkat elite, di tingkat para pemegang jabatan. Bagaimana dengan konstituennya, di tingkat bawahnya? Kita tahu di masa lalu jika Golkar memenangkan pemilu, maka kecamatan dan kampung-kampung yang memilih PPP dan PDI itu tidak diperhatikan, jalannya dibiarkan rusak, dst. Tapi sebaliknya. Kecamatan dan kampung-kampung yang memilih Golkar itu jadi makmur. Mereka (penguasa Golkar) sendiri menganggap itu sah...

WL

Itu contoh di masa orde baru. Kita tahu bahwa orde baru tidak demokratis. Itu pertama. Jadi contoh Anda tidak sah. Kedua, kalau kita bicara kenyataan sekarang, yang terjadi di Indonesia itu seperti di Amerika. Ada sistem nasional dan lokal. Kalau di tingkat nasional, tidak ada satu partai pun yang menang (mayoritas). Golkar mendapatkan suara terbanyak pada pemilu lalu tapi tidak mayoritas. Golkar hanya meraih 20 persen. Mereka harus bergabung untuk koalisi. SBY harus koalisi. Jadi tidak ada satu partai yang menang. Kemudian kita lihat PKS sekarang. Apakah partai itu ingin tetap di dalam atau di luar. Begitu juga di tingkat lokal. Kita tidak bisa memastikan siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada. Kita akan melihat mozaik politik di Indonesia. Jadi tidak mungkin Golkar atau partai besar lain yang menentukan (kemenangan) itu.

HB

Misalnya Golkar hanya berkoalisi dengan tiga partai besar. Padahal pesertanya 40 partai?

WL

Kita harus melihat ini secara empiris. Tapi saya ragu kalau Golkar menang, maka yang lain tidak mendapat apa-apa...

HB

Tadi Pak Bill mengatakan bahwa partai pemenang pemilu itu belum tentu meninggalkan partai yang kalah. Ini membawa kita memasuki tema yang lebih menarik meski dibicarakan dengan nada khawatir: hak-hak minoritas. Pak Bill pun mengatakan bahwa minoritas itu tidak perlu khawatir hanya karena partainya kalah. Pak Bill, di mana kita bisa mencari sumber pendasaran bagi hak-hak minoritas itu?

WL

Kita kembali pada definisi awal. Bahwa di dalam sebuah demokrasi terdapat beragam bentuk partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling utama adalah pemilu. Tapi kita tahu di belakang itu (pelaksanaan pemilu/partisipasi) ada hak-hak politik yang terjamin. Inilah jaminan bagi minoritas bahwa hak-hak politik mereka tidak tercabut (*unalienable right*).

HB

Apakah Anda yakin bahwa pendasaran teoritiknya bisa diperoleh dari konsep demokrasi sendiri?

WL

Ya, kenapa tidak.

HB

Banyak sarjana mengatakan bahwa demokrasi itu sebenarnya prosedur...

WL

Saya ingin menekankan bahwa prosedur tanpa dasar hak-hak (politik) itu tidak menjadi konsep demokrasi yang layak dan standar di dalam dunia akademik di Amerika. Yang menjadi standar adalah gabungan antara partisipasi dengan kebebasan. Arti demokrasi empiris di negara-negara yang disebut demokratis tadi adalah gabungan antara kebebasan yang menjamin partisipasi.

HB

Kemarin saya bicara sama Ahmad Sahal. Dia mencoba menerobos persoalan ini dengan meminjam ide republik dalam filsafat negara. Jadi jalan keluar bagi minoritas ini, menurutnya, bukan pada demokrasi tetapi pada ide republik itu?

WL

Memang salah satu ciri dari teori republik awal adalah penekanannya pada peran individu di dalam demokrasi. Yaitu bahwa setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat pada umumnya.

HB

Itu konsep Rosseau ya?

WL

Konsep Rosseau dan Machiavelli. Ahmad Sahal kan ahli filsafat politik, sementara saya pragmatis politik. Jadi agak sulit bagi saya menghadapi konsep tinggi ini. Tapi sejauh yang saya ketahui, istilah republikan itu sekarang jarang dipakai. Saya tahu bahwa Sahal ingin menghidupkannya kembali. Itu menarik. Saya akan mengikuti usaha dia untuk mengembangkannya. Tapi saya tidak melihat itu sebagai keharusan. Bagi saya demokrasi sendiri sudah cukup sebagai kerangka, sebagai prosedur. Kita memang harus membicarakan substansi juga. Tapi itu lepas dari masalah utama dan kerangka awal dari (demokrasi).

HB

Jadi jaminan bagi minoritas bisa diperoleh dari definisi standar tadi (demokrasi procedural)?

WL

Ya. Hak untuk bicara secara bebas, hak mengemukakan pendapat, pers yang bebas, dsb. Hak-hak itu sangat penting. Kemudian individu-individu di dalam setiap masyarakat merasa bisa memainkan peran dalam setiap pemilu. Kita tahu mereka tidak akan masuk penjara bila berbeda pendapat dengan penguasa..

HB

Apa pandangan Anda tentang tesis Fareed Zakaria? Dalam bukunya dia bicara tentang demokrasi illiberal. Saya kira sebelumnya sudah banyak yang bicara tentang ini. Tapi yang merumuskan dalam bentuk buku yang utuh itu baru Fareed Zakaria. Seorang editor dari News Week. Apa komentar Anda tentang tesis Fareed ini?

WL

Bagi saya, kaum akademis di Amerika dan mungkin di mana-mana suka menggunakan istilah oksimoron. Dua kata yang berseteru. Jadi istilah demokrasi illiberal itu tidak

menggambarkan sesuatu yang benar, yang nyata di masyarakat. Saya sangat marah dan jengkel ketika membaca buku Fareed Zakaria itu. Sebab saya menganggapnya dangkal dan tidak membantu kita untuk mengerti masalah. Tapi seingat saya dia menggunakan Singapura dan Rusia sebagai contoh demokrasi illiberal. Bagi saya dua negara itu bukan demokrasi. Jadi enggak usah dibicarakan lagi.

HB

Harusnya dia membicarakannya dari perspektif lain, misalnya dari sudut pertanian. Begitu?

WL

Atau kita bisa membicarakan sejauh mana masyarakat dilibatkan di dalam keputusan negara. Itu kadang-kadang digunakan istilah kuasi atau semi demokrasi. Tapi itu bukan demokrasi. Demokrasi (sejati) mengharuskan setiap individu untuk berpartisipasi semaksimal mungkin.

HB

Konsep Fareed Zakaria itu sebenarnya enggak banyak gemanya. Ini kutang begitu menarik. Tapi yang menarik adalah hubungan demokrasi dengan kebebasan. Sebab ini basisnya. Warga negara berhak menikmati kebebasan penuh dalam iklim demokrasi. Tapi kita tahu sekarang ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi atau mekanisme demokrasi untuk mempromosikan agenda-agenda tidak demokratis. Bagaimana menurut Anda?

WL

Ada setiap tensi atau ketegangan di setiap negara yang memiliki minoritas politik, partai yang berdasarkan ideology. Mereka (minoritas?) menggunakan jalur demokrasi untuk berkuasa tetapi tidak punya komitmen pada demokrasi.

HB

Dia hanya memanfaatkan saja?

WL

Ya. Selama setengah abad, sejak akhir Perang Dunia II sampai runtuhnya Uni soviet, kita lihat (banyak negara) di mana-mana bermasalah dengan partai komunis. Di Amerika, partai komunis hampir dibubarkan dan dilarang. Partai itu dianggap kepanjangan tangan dari Uni Sovyet, bukan partai yang hidup di Amerika sendiri (yang mencerminkan sikap hidup bangsa Amerika). Ini yang saya sebut ketegangan tadi: bahwa para pemimpin komunis di Amerika adalah orang Amerika juga. Pada akhirnya mereka dianggap punya hak untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dan kalau masyarakat mau memilih mereka, itu adalah hak masyarakat di dalam sistem pemilihan demokratis.

HB

Sampai sekarang partai komunis di Amerika masih ada?

WL

Masih ada.

HB

Walaupun tidak pernah besar?

WL

Ya.

HB

Barangkali kita bisa membubarkan partai tersebut dengan argumen bahwa platform dan semangat juang partai itu berlawanan dengan aturan main demokrasi yang paling mendasar. Bisa enggak partai itu dibubarkan? Atau bisa enggak kita bilang bahwa kehadiran mereka tidak sah?

WL

Tidak bisa. Ada perdebatan mengenai itu. Tapi orang liberal tulen tidak menginginkan pembubaran partai komunis. Karena itu akan menciptakan musuh baru. Tapi mungkin lain lagi kalau saya (menetap) di Italia. Partai komunis di Italia meraih 25 persen dari seluruh suara dan selalu menjadi faktor penting di dalam politik Italia.

HB

Di Eropa itu ada eurocomunism. Satu varian yang berbeda sekali...

WL

Itu terjadi baru-baru ini. Tapi kalau kita bicara tahun 50-60-an, itu sangat menakutkan.

HB

Stalinistik?

WL

Ya. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa argumen Anda tidak berbobot. Argumen Anda tetap berbobot dan selalu harus dipikirkan. Juga seperti di Aljazair.

HB

Kita bicara masih dalam tema memperkuat demokrasi liberal. Amerika sendiri, seperti Anda katakan tadi, membiarkan begitu saja Partai komunis tumbuh, mengambang. Tidak ada keputusan yang *decisive*: apakah itu konstitusional atau tidak. Bagaimana bangsa Amerika menghadapi problem semacam ini?

WL

Diperdebatkan terus. Selain kasus di atas, ada juga kasus aborsi. Itu sudah puluhan tahun dibicarakan di Amerika meski tanpa hasil. Tapi memang kenyataannya seperti itu.

HB

Tapi kalau aborsi kan soal kebijakan, lain dengan partai. Ini menyangkut eksistensi partai. Lalu bagaimana dengan Klux Klan? Apakah dilarang?

WL

Tidak. Tapi kita harus membedakan antara organisasi dan perorangan. Kalau ada orang yang melakukan makar, membunuh orang, dsb seperti yang dilakukan Kluk-kluk klan, maka polisi harus menangkap mereka, orang per-orang. Bukan organisasinya.

HB

Kalau Lacosanostra (?)?

WL

Itu lain lagi. Itu organisasi mafia. Itu kriminal belaka. Tapi saya kira itu organisasi tanpa bentuk (OTB).